



DUGAAN SUAP PEMKOT YOGYA  
**KPK Periksa 6 Saksi**

**JAKARTA (KR)** - Penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, penyidik KPK telah memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus tersebut.

Para saksi yang akan diperiksa, jelasnya, untuk tersangka Vice President Real Estate PT SA Oon Nusihono (ON) dan kawan-kawan. "Jadi, hari ini (Senin) pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tersangka ON dan kawan-kawan," ujar Ali Fikri di Jakarta, Senin (20/6).

Keenam saksi itu, menurut Ali, Head of Finance and Accounting Summarecon Property Development Doni Wirawan, dua Direktur Business and Property Development PT Summarecon Agung masing-masing Syarif Benjamin dan Herman Nagaria,

**\* Bersambung hal 7 kol 5**

**KPK** ..... **Sambungan hal 1**

Direktur PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika, Staf Finance PT Summarecon Marcella Devita, serta Head of Finance Regional 8 PT Summarecon Amita Kusumawaty.

Sebelumnya KPK telah menetapkan empat tersangka. Diduga sebagai penerima yakni mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH), dan Triyanto Budi Yuwono (TBY) selaku sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi sebagai penerima suap.

Sementara itu, sebagai pemberi suap Oon Nusihono (ON). Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pada 2019 tersangka ON melalui Dandan Jaya selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP) mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) mengatasnamakan

PT JOP untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah cagar budaya kepada DPMPPTSP Pemkot Yogya. PT JOP merupakan anak usaha dari PT SA Tbk.

Permohonan izin berlanjut pada 2021, lalu untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan Haryadi yang saat itu menjabat Walikota Yogya periode 2017-2022.

KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan Haryadi, di antaranya Haryadi berkomitmen akan selalu mengawal permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR agar segera menerbitkan IMB yang dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung.

**(Ful)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005